



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Rancangan Akhir Renja Tahun 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	48
B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	49
C. Kebijakan Dan Solusi	50
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	51
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	62
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	65
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2 Tujuan dan Sasaran	100
3.2 Program dan Kegiatan	101
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	115
BAB IV KESIMPULAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	12
Tabel TC. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2022-2025	52
Tabel TC. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	67
Tabel TC. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rencana kerja perangkat daerah (RENJA) merupakan perumusan dari rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA), sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RENJA memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. RENJA Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. RENJA merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini adalah dokumen RENJA DISHUB Kab. Tangung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025.

Yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENJA DISHUB Kab. Tangung Jabung Barat Tahun 2025 ini adalah UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan PERMENDAGRI 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu

diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan focus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam bekerja menuntaskan isu isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Barat adalah :

“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangn, tugas pokok dan, fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah melaksanakan misi ke-5 (kelima) yaitu :

“Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota”

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas bidang perhubungan untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pemerataan pengembangan jaringan transportasi dari daerah terpencil ke kota dan mendorong sebagai peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;
- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
- d. Meningkatnya tertib laik angkutan umum.
- e. Pemerataan konektivitas melalui pengembangan jaringan terayek antar kabupaten maupun antar desa.

Dari sub agenda bidang perhubungan tersebut tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengintegrasikan keberhasilan program dengan pemanfaatan anggaran (APBD) yang optimal dan mendukung keberhasilan visi misi lingkup daerah/kabupaten, lingkup provinsi hingga lingkup nasional. Sehingga memberikan efek nyata dan membantu mensejahterakan masyarakat melalui sektor perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sasaran dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sasaran penyusunan RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah agar kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2025:

- a. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
- b. Mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- c. Selaras dengan PERUBAHAN RENSTRA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;

- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3.Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2021-2026

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sub Bab ini mengevaluasi hasil pelaksanaan RENJA DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dan capaiannya. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 sampai dengan tahun 2023 Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2023 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29

Tabel T.C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Tahun 2026

Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi (%) Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab				
							I		II		III		IV				12			13 = 6 + 13		14 = 14/6 x 100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	Dokumen	25 Rp 75.000.000	10 Rp 56.427.673	5 Rp 10.300.000	3 Rp 0,00	3 Rp 0,00	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	6 Rp 0,00	0 Rp 0,00	16 Rp 56.427.673	64,00%	75,24%	Dishub							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dokumen	25 Rp 75.000.000	10 Rp 56.427.673	5 Rp 10.300.000	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	12 Rp 0,00	0 Rp 0,00	22 Rp 56.427.673	88,00%	75,24%	Dishub							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	18 Rp 90.000.000	0 Rp 0	2 Rp 14.950.000	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	0 Rp 0,00	12 Rp 13.100.000,00	12 Rp 13.100.000	12 Rp 13.100.000	66,67%	14,56%								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Bulan	72 Rp 23.313.242,363	24 Rp 6.449.417,197	12 Rp 3.604.819,419	3 Rp 434.431.811,00	0 Rp 0	1.322.950.008,00	0 Rp 0	795.517.501,00	0 Rp 0	861.579.686,00	37,50%	42,31%	Dishub							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Bulan	72 Rp 22.288.378,363	24 Rp 6.153.117,197	12 Rp 3.428.689,419	3 Rp 393.392.033,00	3 Rp 1.280.550.008,00	3 Rp 753.171.501,00	3 Rp 821.209.686,00	12 Rp 3.248.323,228	36 Rp 9.401.440,425	50,00%	42,18%	Dishub								

Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	72	1.024.864.000	24	296.300.000	12	176.130.000	3	41.039.778,00	3	42.400.000,00	3	42.346.000,00	3	40.370.000,00	12	166.155.778	36	462.455.778	50,00%	45,12%	Dishub
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	6	60.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000	12	1.000.000	200,00%	1,67%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Unit	48	1.350.000.000	18	82.632.220	8	68.000.000	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	52.818.150,00	12	52.818.150	30	135.450.370	62,50%	10,03%	Dishub
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya prasarana transportasi	Unit	48	1.350.000.000	18	82.632.220	8	68.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	52.818.150,00	8	52.818.150	26	135.450.370	54,17%	10,03%	Dishub

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Stel	792	350.000.000	27	47.982.000	128	68.800.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	68.720.000,00	-	68.720.000	27	116.702.000	3,41%	33,34%	Dishub
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegawai	Stel	792	350.000.000	27	47.982.000	128	68.800.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	128	68.720.000,00	128	68.720.000	155	116.702.000	19,57%	33,34%	Dishub
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	72	2.037.676.872	24	855.081.648	12	436.410.150	3	93.146.397,00	3	69.555.854,00	0	15.300.000,00	0	249.081.966,00	6	427.084.217	30	1.282.165.865	41,67%	62,92%	Dishub
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	26.766.872	24	25.429.764	12	5.438.000	3	1.736.000,00	3	3.503.000,00	0	0,00	3	5.869.000,00	12	11.108.000	36	36.537.764	50,00%	136,50%	Dishub
Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	Bulan	51	245.000.000	24	94.985.109	12	46.811.000	3	7.548.000,00	3	22.132.000,00	0	0,00	6	3.799.000,00	12	33.479.000	36	128.464.109	70,59%	52,43%	Dishub
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	Bulan	72	125.000.000	24	49.415.000	12	30.000.000	3	3.000.000,00	3	9.000.000,00	0	4.000.000,00	3	14.000.000,00	12	30.000.000	36	79.415.000	50,00%	63,53%	Dishub

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	95.425.000	24	104.792.750	12	19.320.000	3	1.800.000,00	3	500.000,00	3	10.500.000,00	3	6.300.000,00	12	19.100.000	36	123.892.750	50,00%	129,83%	Dishub
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	45.485.000	24	11.825.000	12	6.600.000	3	650.000,00	3	1.400.000,00	3	800.000,00	3	2.350.000,00	12	5.200.000	36	17.025.000	50,00%	37,43%	Dishub
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	Bulan	72	1.500.000.000	32	568.634.025	12	328.241.150	3	78.412.397,00	3	33.020.854,00	3	0,00	3	216.763.966,00	12	328.197.217	44	896.831.242	61,11%	59,79%	Dishub
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	84	1.392.000.000	24	0	12	44.533.600	3	44.993.766,00	3	72.649.538,00	0	53.892.908,00	0	85.841.792,00	6	257.378.004	30	257.378.004	35,71%	18,49%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	342.000.000	0	0	9	19.943.600	0	0,00	4	11.943.600,00	0	0,00	6	0,00	10	11.943.600	10	11.943.600	166,67%	3,49%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	600.000.000	20	0	1	15.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14.430.000,00	1	14.430.000	21	14.430.000	35,00%	2,41%	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	450.000,000	8	0	2	9.590.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	0	8	0	44,44%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Meningkat	Bulan	72	631.719.394	24	190.132.549	12	126.648.020	3	24.649.883,00	3	33.762.969,00	0	28.446.454,00	0	39.768.896,00	6	126.628.202	30	316.760.751	41,67%	50,14%	Dishub
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	10.605.370	24	2.190.000	12	1.420.000	3	300.000,00	3	600.000,00	3	500.000,00	3	0,00	12	1.400.000	36	3.590.000	50,00%	33,85%	Dishub
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	Bulan	72	517.720.000	24	136.386.707	12	102.975.600	3	20.043.883,00	3	26.342.969,00	3	24.946.454,00	3	31.642.896,00	12	102.976.202	36	239.362.909	50,00%	46,23%	Dishub
	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	103.394.024	24	51.555.842	12	22.252.420	3	4.306.000,00	3	6.820.000,00	3	3.000.000,00	3	8.126.000,00	12	22.252.000	36	73.807.842	50,00%	71,39%	Dishub

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasaran Kantor Dalam Kondisi Baik	Unit	550	4.239.372.404	192	1.098.934.025	32	291.696.500	10	83.721.500,00	10	59.344.250,00	3	98.738.000,00		175.813.499,00	5	417.617.249	197	1.516.551.274	35,82%	35,77%	Dishub
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Meningkat	Unit	192	2.665.355.000	64	659.266.602	32	261.336.500	10	77.733.000,00	10	45.444.250,00	5	93.738.000,00	7	151.713.999,00	32	368.629.249	96	1.027.895.851	50,00%	38,57%	Dishub
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	Unit	324	154.017.404	114	177.577.613	54	30.360.000	10	5.988.500,00	15	13.900.000,00	15	5.000.000,00	14	24.099.500,00	54	48.988.000	168	226.565.613	51,85%	147,10%	Dishub
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	34	1.420.000.000	14	262.089.810	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	0	14	262.089.810	41,18%	18,46%	Dishub	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%	72	4.386.180.000	24	1.950.977.106	12	867.580.000	3	146.250.000,00	3	547.623.848,00	0	0,00	0	247.685.000,00	9	941.558.848	30	2.892.535.954	41,67%	65,95%	Dishub

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	72	875.000.000	24	335.606.106	12	236.200.000	0	0,00	1	222.928.848,00	0	0,00	0	0,00	1	222.928.848	25	558.534.954	34,72%	63,83%	Dishub
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Disediakan	Unit	25	875.000.000	8	335.606.106	2	236.200.000	0	0,00	1	222.928.848,00	0	0,00	0	0,00	1	222.928.848	9	558.534.954	36,00%	63,83%	Dishub
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	5000	200.000.000	0	0	12	10.000.000	0	0,00	1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	6.000.000	1	6.000.000	0,02%	3,00%	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	34	450.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0,00	1	29.943.582,00	0	0,00	0	0,00	1	29.943.582	1	29.943.582	2,94%	6,65%	
	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	%	72	3.511.180.000	24	1.615.371.000	12	631.380.000	3	146.250.000,00	3	324.695.000,00	3	0,00	0	247.685.000,00	6	718.630.000	33	2.334.001.000	45,83%	66,47%	Dishub
	Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	Operasi	196	3.511.180.000	24	1.615.371.000	12	631.380.000	3	146.250.000,00	3	324.695.000,00	0	0,00	3	247.685.000,00	9	718.630.000	33	2.334.001.000	16,84%	66,47%	Dishub

	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	72	1.050.000.000	24	320.235.000	12	146.388.000	0	0,00	1	29.943.582,00	0	60.056.418,00	0	55.720.000,00	1	145.720.000	25	465.955.000	34,72%	44,38%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Operasi	30	1.050.000.000	10	320.235.000	6	146.388.000	0	0,00	1	29.943.582,00	0	60.056.418,00	5	55.720.000,00	6	145.720.000	16	465.955.000	53,33%	44,38%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%	72	750.000.000	24	0	12	30.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29.830.000,00	-	29.830.000	24	29.830.000	33,33%	3,98%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	190	750.000.000	0	0	55	30.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	55	29.830.000,00	55	29.830.000	55	29.830.000	28,95%	3,98%

	Program Pengelolaan Pelayaran			72	9.797.280.000	24	1.390.892.667	12	1.424.403.126	3	215.025.000	3	216.156.750	3	433.135.000	3	631.203.626	12	1.495.520.376	36	2.886.413.043	50,00%	29,46%	Dishub
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	%	72	3.929.280.000	24	546.920.000	12	1.098.100.000	3	215.025.000,00	3	216.156.750,00	3	433.135.000,00	3	304.900.500,00	12	1.169.217.250	36	1.716.137.250	50,00%	43,68%	Dishub
	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	Bulan	72	3.929.280.000	24	546.920.000	12	1.098.100.000	3	215.025.000,00	3	216.156.750,00	3	433.135.000,00	3	304.900.500,00	12	1.169.217.250	36	1.716.137.250	50,00%	43,68%	Dishub

	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	72	5.868.000.000	24	843.972.667	12	326.303.126	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	326.303.126,00	6	326.303.126	30	1.170.275.793	41,67%	19,94%	Dishub
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau Kondisi Baik	Unit	19	5.868.000.000	12	843.972.667	12	326.303.126	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	326.303.126,00	6	326.303.126	18	1.170.275.793	94,74%	19,94%	Dishub
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00%							
Predikat kinerja																	sangat rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. OPD mempunyai komitmen tinggi Untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan 2. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan daerah maupun perencanaan 3. Opd melakukan observasi dan menetapkan sasaran kinerja yang tepat dan relevansi terhadap capaian visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Penyelesaian dan penyerapan anggaran kegiatan menumpuk pada akhir tahun dan Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun termuat dalam DPA OPD 2. Belum dibuat instrumen evaluasi untuk setiap tahapan dalam SOP sehingga tidak diketahui apakah tahapan tersebut sudah dilaksanakan atau belum 3. Realisasi Program dan Kegiatan tidak memenuhi targer dikarenakan kekurangan pagu anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																								
Disusun Kuala Tungkal, tanggal 10 Januari 2024 KEPADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  SYAMSUL JUHARI, S.Sos Kabina Utama Muda NIP. 19761223 199203 1 001											Dievaluasi Kuala Tungkal, tanggal KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Dr. H. KATAMSO SA, SE., ME. NIP. 19730116 200012 1 001													

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan / digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2021 - 2026 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam rangka pertanggungjawaban kinerja, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas telah menetapkan 7 Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi, yaitu:

1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal
4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik
5. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
6. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
7. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dari rata – rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut dapat dinyatakan sangat baik dari target yang telah ditetapkan.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dalam tahun 2023 nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp.8.290.200.212,- pada

APBD Perubahan, terealisasi sebesar Rp. 7.934.437.954,-, (95,71%) , dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5,603,132,212,- Terealisasi sebesar Rp. 5,285,775,124 dengan persentase (94.34%).
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,174,968,000,- Terealisasi sebesar Rp. 1,153,142,430,- dengan persentase (98,14%)
- Program Pengelolaan Pelayaran Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1,512,100,000,- Terealisasi Sebesar Rp. 1,495,520,400,- dengan persentase (98,9%)

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat 8 sub kegiatan yang realisasinya dibawah 90 % yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.100.000 (87,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.800.000,- merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja Belanja cetak atau fotocopy dokumen perencanaan untuk tahun 2023.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.000.000, terealisasi sebesar Rp. 52,818,150 (77,67%). Sisa anggaran sebesar Rp. 15,181,850 merupakan Efisiensi belanja yang merupakan sisa belanja asuransi kendaraan 2023.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 469,909,000, terealisasi sebesar Rp. 417,117,749 (88,77%). Sisa anggaran sebesar Rp.

417,117,749 merupakan Merupakan efisiensi dari Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dikarenakan terdapat kerusakan pada salah satu kendaraan dinas operasional lapangan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan sangat baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan- penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-

kadang dilapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yag telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

a. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2023 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa tranportasi pada bidang darat maupun laut dengan

Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan
7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

b. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayah Pembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Bab Capaian Analisis Kinerja DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat memaparkan kajian terhadap capaian kinerja DISHUB Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan indikator sasaran (PERUBAHAN RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2021-2026), indikator kinerja utama (IKU), serta indikator kinerja kunci (IKK) Bidang Perhubungan sesuai dengan PP RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah., telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

1.1. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat Dan Laut

- 1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia
- 1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia
- 1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
- 1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik

1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut

- 1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia
- 1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan
- 1.2.3. Angka Kecelakaan lalu Lintas Darat dan Laut

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam (table T-C.30) sebagai berikut :

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi presentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa outcome tercapai cukup baik dengan realisasi pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,96% dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 101,22%.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

TABEL T-C 30													
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT													
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022-2025													
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN K				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
7	PERHUBUNGAN												
7,1	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dok	2		5	5	3	3					
7,2	Pemeliharaan Halte Sungai	Lokasi	1		3	3	3	0					
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN													
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	0	0	2	3	
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN													
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan													
	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	98	98	98	98	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

	2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	95	95	95	95	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan													
	1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
	2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	38	38	38	38	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan													
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	57,8	57,4	57,8	57,8	
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor													

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	27,8	20,4	21,8	27,8	
e. Sumber Daya Manusia (SDM)												
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	10	10	10	20	
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	10	10	10	20	
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	5	5	5	5	
4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	10	11	12	12	
f. Keselamatan												
1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	96,7	97,7	98	98,1	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	50	50	70	75	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN K				SI CAPAIAN TAI				CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	47	47	47	48	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan													

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan												
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan												
1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	87	87	89	90	
d. Sumber Daya Manusia												

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	46	48	48,5	48,5	
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut													
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	88	88	88	89	
No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KISI CAPAIAN TAI				PROYEKSI		CATATAN ANALISI		
					2020	2021	2022	2023	2020	2021		2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut													

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	65	65	65	65	
c. Keselamatan													
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
c. Sumber Daya Manusia (SDM)													
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
LPPD BIDANG PERHUBUNGAN													
1													
2													

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

1. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:

- a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
 - b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kepadatan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- 2. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat**

Urusan Perhubungan

a. STRENGTHS (KEKUATAN):

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.

3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi
- e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. kepada masyarakat dalam jangka panjang.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
 2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
 3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
 4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data

- dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;
5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
 6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
 7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
 8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
 9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota/kabupaten.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2023 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2021 – 2026;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Rp	Lokasi	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	Dishub	100	Rp 8.039.249.974	Dishub	100	Rp 8.039.249.974	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	Dishub	16	Rp 77.000.000	Dishub	16	Rp 77.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	Rp 12.000.000	Dishub	4	Rp 12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000	Dishub	1	Rp 5.000.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dishub	3	Rp 20.000.000	Dishub	3	Rp 20.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dishub	5	Rp 25.000.000	Dishub	5	Rp 25.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/O rang	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	Dishub	2	Rp 180.000.000	Dishub	2	Rp 180.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	Dishub	100%	Rp	210.000.000	Dishub	100%	Rp	210.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	8	Rp	200.000.000	Dishub	8	Rp	200.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp	5.000.000	Dishub	1	Rp	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Dishub	134	Rp	255.000.000	Dishub	134	Rp	255.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	132	Rp	195.000.000	Dishub	132	Rp	195.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Dishub	2	Rp	60.000.000	Dishub	2	Rp	60.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Dishub	100%	Rp	611.590.434	Dishub	100%	Rp	611.590.434
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	210	Rp	4.990.434	Dishub	210	Rp	4.990.434
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor	Paket	Dishub	6	Rp	75.000.000	Dishub	6	Rp	75.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp	25.000.000	Dishub	12	Rp	25.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	800	Rp	25.000.000	Dishub	800	Rp	25.000.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp	95.000.000	Dishub	12	Rp	95.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	12	Rp	6.600.000	Dishub	12	Rp	6.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	12	Rp	380.000.000	Dishub	12	Rp	380.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	Dishub	27	Rp	395.000.000	Dishub	27	Rp	395.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	Rp	-		0	Rp	-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp	120.000.000	Dishub	3	Rp	120.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		10	Rp	50.000.000		10	Rp	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	Rp	50.000.000		1	Rp	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	10	Rp	100.000.000	Dishub	10	Rp	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp	75.000.000	Dishub	3	Rp	75.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	Dishub	12	Rp	173.987.300	Dishub	12	Rp	173.987.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	12	Rp	1.316.185	Dishub	12	Rp	1.316.185

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 150.000.000	Dishub	1	Rp 150.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 22.671.115	Dishub	1	Rp 22.671.115
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	Dishub	95	Rp 1.131.672.240	Dishub	95	Rp 1.131.672.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	2	Rp 200.000.000	Dishub	2	Rp 200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	32	Rp 531.300.000	Dishub	32	Rp 531.300.000

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Rp -	54	Rp 30.372.240	Rp -	54	Rp 30.372.240	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dishub	7	Rp 370.000.000	Dishub	7	Rp 370.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan		%		100	Rp 3.330.000.015		100	Rp 3.330.000.015	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dishub	1	Rp 50.000.000	Dishub	1	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 50.000.000	Dishub	1	Rp 50.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	Dishub	45	Rp 135.000.000	Dishub	45	Rp 135.000.000	

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Dishub	25	Rp	100.000.000	Dishub	25	Rp	100.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	20	Rp	35.000.000	Dishub	20	Rp	35.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	Dishub	100%	Rp	1.500.000.000	Dishub	100%	Rp	1.500.000.000
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	Dishub	1	Rp	1.500.000.000	Dishub	1	Rp	1.500.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	Dishub	-	Rp	-	Dishub	-	Rp	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Dishub	-	Rp	-	Dishub	-	Rp	-
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	-	Rp	-	Dishub	-	Rp	-

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	Dishub	100%	Rp 10.000.000	Dishub	100%	Rp 10.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	Dishub	100	Rp 280.000.000	Dishub	100	Rp 280.000.000	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	Dishub	2	Rp	40.000.000	Dishub	2	Rp	40.000.000
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	1000	Rp	45.000.000	Dishub	1000	Rp	45.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dishub	1000	Rp	50.000.000	Dishub	1000	Rp	50.000.000
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	2	Rp	20.000.000	Dishub	2	Rp	20.000.000
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	1	Rp	25.000.000	Dishub	1	Rp	25.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	8	Rp	100.000.000	Dishub	8	Rp	100.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	Dishub	100%	Rp	1.090.000.000	Dishub	100%	Rp	1.090.000.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	80.000.000	Dishub	1	Rp	80.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	36	Rp	980.000.000	Dishub	36	Rp	980.000.000
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp	30.000.000	Dishub	3	Rp	30.000.000

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	Dishub	2	Rp 50.000.000	Dishub	2	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	2	Rp 75.000.000	Dishub	2	Rp 75.000.000	

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 175.000.000	Dishub	100%	Rp 175.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	5	Rp 175.000.000	Dishub	5	Rp 175.000.000	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	15	Dishub	100%	Rp	15

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Dishub	1	Rp	15	Dishub	1	Rp	15		
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Rp	-	1	Rp	10.000.000	Rp	-	1	Rp	10.000.000
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	Dishub	100%	Rp	6.175.000.000	Dishub	100%	Rp	6.175.000.000		

Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 1.100.000.000	Dishub	100%	Rp 1.100.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	

<p>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Laporan</p>	<p>Dishub</p>	<p>12</p>	<p>Rp 1.090.000.000</p>	<p>Dishub</p>	<p>12</p>	<p>Rp 1.090.000.000</p>	
<p>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>%</p>	<p>Dishub</p>	<p>100%</p>	<p>Rp 10.000.000</p>	<p>Dishub</p>	<p>100%</p>	<p>Rp 10.000.000</p>	

Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp	10.000.000	Dishub	3	Rp	10.000.000

Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	100%	Rp	35.000.000	Dishub	100%	Rp	35.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	1	Rp	25.000.000	Dishub	1	Rp	25.000.000

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp	535.000.000	Dishub	100%	Rp	535.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	10	Rp	500.000.000	Dishub	10	Rp	500.000.000

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	2	Rp	25.000.000	Dishub	2	Rp	25.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp	4.405.000.000	Dishub	100%	Rp	4.405.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	Dishub	1	Rp	-	Dishub	1	Rp	-
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	4	Rp	900.000.000	Dishub	4	Rp	900.000.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	Dishub	1	Rp	2.500.000.000	Dishub	1	Rp	2.500.000.000
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	Dishub	3	Rp	995.000.000	Dishub	3	Rp	995.000.000
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000
Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
---	---	---------	---------------	---	----	---	---------------	---	----	---

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
					Rp 17.544.249.989			Rp 17.544.249.989	

Kuala Tungkal, Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAMSUL MUHARRIS, S.Sos

Perencana Muda

NIP. 19701223-199203-1-001



2.5. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

**Tabel T-C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KAUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PLAYARAN				
Kegiatan	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	-
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	1 Dokumen	Pembangunan Halte Sungai/Dermaga Sungai Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang
		Desa Pelabuhan dagang		1 Dokumen	Pembangunan Dermaga TBS di Daerah Teluk

2.6. Penelaah Terhadap Usulan Musrenbang dan Pokir DPRD

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembanunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 ayat (1) “Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130.

Proses pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Opd melalui Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka RKPD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 20 Bulan Februari Tahun 2024 di Ruang Rapat pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyepakati hal – hal sebagai berikut :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kecamatan dan pokir DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KEDUA** : Menyetujui daftar usulan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini
- KETIGA** : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II & III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini.
- KEEMPAT** : Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Kepmendari 50 Tahun 2021, yang memuat 3 Program,, 30 Kegiatan dan 72 Sub kegiatan .

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

- KELIMA** : Relevansi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dengan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat termuat dalam poin 1 (kesatu) yaitu “ Membangun jalan dan jembatan penghubung antar desa, kecamatan, kabupaten, dan perbatasan”.
- KEENAM** : Dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2025 telah termuat 25 Usulan Pokir DPRD dan 13 Usulan dari Musrenbang serta direkap melalui aplikasi SIPD RI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETUJUH** : Rehab Berat Dermaga Tambatan Perahu RT.02 Dusun Teladan Kec. Kuala Betara diketahui kerusakan berat ada pada Lantai ponton tambatan halte sungai. Sampaikan Proposal pengajuan ke Kantor Dinas Perhubungan Rencana Pembangunan Halte Sungai RT. 01 Kelurahan Teluk Nilau Kec.
- KEDELAPAN** : Pengabuan akan dilakukan survey lokasi terlebih dahulu untuk memastikan ketepatan lokasi pembangunan dan potensi kemudahan aksesibilitas masyarakat maupun perekonomian masyarakat
- KESEMBILAN** : Usulan Pembangunan Turap pinggir Sungai Pengabuan sepanjang 150 M dari kecamatan merlung masih belum jelas, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan Pembuatan turap pinggir sungai merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup
- KESEPULUH** : Untuk 2 usulan kecamatan Bram Itam akan dilakukan survey lokasi dan penyiapan dokumen usulan serta akan ditelaah terlebih dahulu terhadap kemudahan aksesibilitas dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut.
- KESEBELAS** : Untuk 8 usulan aspirasi dari kecamatan senyerang akan dilakukan survey lokasi dan permintaan proposal usulan pengajuan dikarenakan titik lokasi dan permasalahan belum tergambar. Pihak dari kecamatan tidak hadir dalam Rapat Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
- KEDUABELAS** : Untuk 25 usulan Pokir DPRD akan ditelaah dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025.
- KETIGABELAS** : Dari keseluruhan usulan aspirasi diatas sangat banyak usulan yang diharuskan menjadi usulan Prioritas dikarekan banyak sekali masyarakat dari Desa yang merasakan kemudahan aksesibilitas dari Desa ke Kota. Akan tetapi hal ini sangat disayangkan tidak dapat tercover secara keseluruhan oleh

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Dinas Perhubungan. Dikarekan Pagu anggaran dan target renja yang telah ditetapkan tidak dapat memenuhi semua usulan tersebut

KEEMPATBELAS : Usulan Musrenbang sudah ditelaah dan dituangkan dalam Lampiran III.

KELIMABELAS : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat akan selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan menyediakan sarana prasaran pendukung untuk masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dari desa ke kota dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sesuai relevansinya terhadap visi dan misi Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat

LAMPIRAN USULAN POKIR DPRD DAN MUSRENBANG TAHUN 2024 :

Lampiran II : Berita Acara Hasil Kesepakatan
 Forum Perangkat Daerah
 Nomor : 500.11/ /DISHUB/2024
 Tanggal : 20 Februari 2024

**DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH SERTA POKIR DPRD
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN 2024**

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	REKOMENDASI SKPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
DAFTAR USULAN MUSRENBANG KECAMATAN										
Kecamatan Kuala Betara										
1	Harmanto	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Rehab Berat Dermaga Tambatan Perahu RT.02 Dusun Teladan Kec. Kuala Betara	RT.02 Dusun Teladan, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan Diterima dan Akan diusulkan kembali kedalam penyusunan anggaran tahun 2025	1	UNit	Rp 200.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Pengabuan										
1	Kelurahan Teluk nilau	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Halte Sungai RT. 01 Kelurahan Teluk Nilau Kec. Pengabuan	RT. 01, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025,	1	Paket	Rp 2.900.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Merlung										
1	Kelurahan Merlung	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Turap pinggir Sungai Pengabuan sepanjang 150 M	Jl. Bhakti Husada Rt. 04 Kel. Merlung Kec. Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan Diterima dan Akan diinput kembali kedalam penyusunan anggaran tahun 2025. Siapkan Dokumen Proposal Pengajuan. dan Detail Foto Lokasi (maksud usulan belum jelas dermaga pelabuhan atau pembangunan turap pinggir sungai)	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Bram Itam										

1	Kelurahan Bram Itam Kiri	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	4. Pembangunan dermaga RT 07 volume 6x6 M	RT 07 Kelurahan Bram Itam Kiri, Kec. Bram Itam	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan (akan dilakukan survey lokasi)	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
2	Supian Kahpi	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	2. Rehab Berat Dermaga/Tambatan Perahu (10M X10M)	RT. 01 Desa Semau, Kec. Bram Itam	Dishub	Usulan Diterima dan Akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025	1	Unit	Rp 200.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
Kecamatan Senyerang										
1	Sutiman	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG, VOLUME 2 UNIT	PARIT 4 , RT.07 DUSUN USAHA KARYA DAN PARIT 7, RT.14 DUSUN TANJUNG KALIMANTAN, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	2	Paket	Rp 6.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
2	Muhammad Daud	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	3. PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG 25 METER X 3 METER. BANGUNAN INI SANGAT DIBUTUHKAN MASYARAKAT UNTUK PEMAKAMAN UMUM	RT. 02 DUSUN KETAPANG DESA TELUK KETAPANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
3	Taslim, S.A.P	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	pembangunan halte sungai volume 1 Paket	RT 04 Dusun Mekar, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
4	Kelurahan Senyerang	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	PRIORITAS 1 Pembangunan Dermaga/Bongkar Muat Volume 1 Paket Kegiatan	Jalan Ahmad Adam RT. 04 Kel. Senyerang, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

5	Kelurahan Senyerang	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	PRIORITAS 2 Pembangunan Halte Sungai Volume 1 Paket Kegiatan	Jalan Tagwa RT. 04 Kel. Senyerang, Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
6	Ismail	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	7. pembangunan halte sungai, 1 unit	Rt 09 Dusun Nusantara, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
7	Taufiq Rahman, SE.Sy	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Peningkatan Halte Sungai Penyeberangan Motor menjadi penyeberangan motor dan mobil menggunakan ponton	Parit Pasirah, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan Diterima dan Akan diinput kembali kedalam penyusunan anggaran tahun 2025. Siapkan Dokumen Proposal Pengajuan	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
8	Arbain, R	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	6.Halte	RT.08 SUNGSANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan Diterima dan Akan diinput kembali kedalam penyusunan anggaran tahun 2025. Siapkan Dokumen Proposal Pengajuan	1	Paket	Rp 2.900.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

DAFTAR USULAN POKIR DPRD

1	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembuatan Dermaga Tambatan Perahu (Kayu) Volume 2 x 30 M	Rt. 08 Parit Batu Pahat Desa Mekar Alam Kecamatan Seberang Kota, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Kegiatan	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
2	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	REHAP PELABUHAN DERMAGA	RT. 06 PARIT KERAMAT DESA DESA MUARA SEBERANG KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	PAKET	Rp 250.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

3	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DERMAGA HALTE	RT. 04 SUNGAI ANGGANG DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan Kelengkapan foto lokasi	1	paket	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
4	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA KUALA LENGKAP DENGAN WC	RT. 01 PARIT BAMIN DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Akan dibangun melalui dana APBN Pada Tahun 2024 Oleh Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Provinsi Jambi	20	Meter	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
5	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN IRIGASI ANAK SUNGAI / PARIT AMPIBI	RT. 06/RT.08 DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi (permasalahan usulan belum jelas , pembuatan irigasi merupakan kewenangan Dinas PU)	1	Kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
6	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA KAYU	RT.08 DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Terdapat pengajuan 2 usulan yang sama	1	paket	Rp	2.500.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
7	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN JALAN ARAH DERMAGA	RT.08 DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan akan dibahas kembali dalam forum OPD, dikarenakan maksud dan tujuan belum jelas, usulan jalan itu merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum	500	Meter		-	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

8	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERAHAPAN DERMAGA (rehab dermaga)	RT 01 DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, dan akan dibahas kembali maksud dan tujuan usulan tersebut di dalam forum OPD Dinas Perhubungan. Lengkapi proposal pengajuan	1	PAKET	Rp 200.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
9	ERLIANI	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA PELABUHAN VOLUME 4 X 5 METER	RT.07 PASAR SUNGAI SAREN KELURAHAN BRAM ITAM KIRI KECAMATAN BRAM ITAM , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	kegiatan	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
10	H. ASSEK	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	peningkatan halte sungai penyeberangan motor menjadi penyeberangan motor dan mobil menggunakan ponton atau tongkang	parit pasirah Desa sungai kepayang, Kab. Tanjung Jabung Barat Kecamatan Senyerang	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, dan akan dibahas kembali maksud dan tujuan usulan tersebut di dalam forum OPD Dinas Perhubungan. Lengkapi proposal pengajuan	250	meter	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
11	HASBI	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN/PERBAIKAN REHAB DERMAGA VOLUME P 8 M X L 6 M	RT. 07 KELURAHAN BRAM ITAM KIRI, KECAMATAN BRAM ITAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, dan akan dibahas kembali maksud dan tujuan usulan tersebut di dalam forum OPD Dinas Perhubungan.	1	kegiatan	Rp 250.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

12	HASBI	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA APUNG	KUALA PARIT SAPAT DESA KUALA BARU KECAMATAN SEBERANG KOTA , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan akan di bangun menggunakan APBD Tahun 2024	1	kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
13	DEDI HADI, SH	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Dermaga Permanen	Parit 6 Dusun Rantau Panjang Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung (perlu dilakukan survey lokasi)	1	Kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
14	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Dermaga Tambatan Perahu volume 100 x 2.5 Meter	Parit Sapat Rt.02 Dusun Rawai Jaya Kuala Baru , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
15	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Bantuan Dana Untuk Halte Sungai Volume 50 x 2,5 Meter	Jl. H Ibrahim RT.06 Dusun Pidada , Kab. Tanjung Jabung Barat kecamatan Seberang kota	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
16	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Perehapan Dermaga volume 100 x 2,5 Meter	RT.04 dan RT.01 Kampung Nelayan , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, siapkan kelengkapan foto lokasi /pendukung (akan dilakukan koordinasi bersama Dinas Perikanan)	1	Kegiatan	Rp	250.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

17	AHMAD JAHFAR, SH	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERENCANAAN DERMAGA BONGKAR MUAT	DESA PASAR SENIN KECAMATAN PENGABUAN, Kab. Tanjung Jabung Barat , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	KEGIATAN	Rp	80.000.000,00	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
18	MUHAMMAD ZAKI, ST	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	pembangunan dermaga kawasan sungai tiram dankelapa gading	kawasan sungai tiram kel sungai nibung dan kawasan tungkla harapan, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	2	kegiatan	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
19	MUHAMMAD ZAKI, ST	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	pembangunan dermaga halte penyebrangan	kel tunggal harapan kecamatan tungka ilir , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	titik	Rp	3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
20	H. ASSEK	Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Laut dan Umum) serta Pelatihan Perikanan Tangkap	PERMOHONAN PENGADAAN BANTUAN POMPONG/PERAHU UNTUK PENYEBRANGAN	DESA PARIT BILAL RT 01 KECAMATAN PENGABUAN, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Dinas Perikanan	1	UNIT	Rp	60.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

21	DEDI HADI, SH	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	DERMAGA APUNG/HALTE SUNGAI	RT.01 PANTAI LAYANG DESA SUAK LABU KECAMATAN KUALA BETARA , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	KEGIATAN	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
22	DEDI HADI, SH	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PENINGKATAN DERMAGA PENYEBERANGAN	DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN BETARA , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung (Disarankan oleh Kadishub untuk merubah bentuk perahu agar halte sungai yang sudah dibangun bisa berfungsi)	1	KEGIATAN	Rp 350.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
23	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Berat Dermaga/Tambatan Perahu Vol 10 x 10 M	RT. 01 Desa Semau Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Kegiatan	Rp 400.000.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau
24	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan dermaga RT 07 Vol 6 x 6 M	RT 07 Kelurahan Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam, Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	Paket	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

25	H. ABDULLAH, SE	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANUNAN DERMAGA TAMBATAN PERAHU	PARIT 6 RT.08 DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN BETARA , Kab. Tanjung Jabung Barat	Dishub	Usulan diterima dan akan diusulkan kembali ke dalam anggaran tahun 2025, Lengkapi proposal pengajuan dan kelengkapan foto lokasi /pendukung	1	kegiatan	Rp 3.000.000.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
----	-----------------	--	------------------------------------	---	--------	---	---	----------	---------------------	--------------------------------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kementerian Perhubungan yang berdasarkan pada dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, visi dan misi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Visi: Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong;

Misi:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;

3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Sasaran strategis pembangunan transportasi nasional Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya konektivitas nasional
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
- 3) Meningkatkan keselamatan transportasi
- 4) Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten
- 5) Meningkatkan tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum
- 6) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian
- 7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan.

Berdasar hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang berkaitan dengan kepentingan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan. Dimana hal

tersebut sesuai dengan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Mewujudkan Kab. Tanjung Jabung Barat melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, handal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama.

Dari indikator sasaran dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, dapat dianalisis faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap target kinerja dalam Renstra Kementerian Perhubungan. Beberapa faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pembagian target kinerja per masing-masing provinsi dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan.
2. Pencapaian target kinerja dalam Renstra Kementerian Perhubungan sebagian tidak dapat dilimpahkan ke masing-masing Pemerintah Daerah karena pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan.
3. Kewenangan terkait transportasi udara berada pada Kementerian Perhubungan.

Beberapa faktor pendorong tercapainya target tersebut:

1. Terdapat peraturan perundangan daerah yang mendukung pelaksanaan capaian kinerja.
2. Terdapat BUMD bidang transportasi dan pihak swasta bersama Pemerintah Daerah menyokong konektivitas transportasi.
3. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk sarana transportasi umum yang rutin dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan transportasi.

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

a. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)
Misi RPJMD :	
Misi 1	: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	: 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	: 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	: 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	: 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dan sasaran 5.1.2 yaitu Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2)

Tabel 3.1

**TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	C	C	C	C	B	B	B
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1350 Unit
		1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		2.1.2. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Program, Kegiatan, serta Sub Kegiatan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Perhubungan menggunakan nomenklatur program sesuai dengan urusan perhubungan untuk program dan kegiatan teknis, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk program dan kegiatan urusan penunjang kantor. Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2025 dalam proses pembuatannya memperhatikan beberapa factor yaitu;

- 1) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal pada dinas perhubungan setiap tahun dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan.
 - 2) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Guna mendukung potensi ekonomi daerah, Dinas Perhubungan membantu ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi atau pengguna jalan melalui kegiatan Pengadaa Perlengkapan Jalan dan Operasional Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

Program, Kegiatan dan Subkegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.

1. Sebagai Relevansi Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan aksesibilitas untuk masyarakat daerah dari desa sampai ke kota.

b. Uraian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b. Pembangunan Gedung Terminal
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor

- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili

Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang

Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan

A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

B. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 120.000.000,-
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. -
3	Retribusi Terminal	Rp. -
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Rp. 400.000.000,-
	Jumlah	Rp. 520.000.000,-

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Kuala Tungkal, Juli 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUHAR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19701221-199203 1 001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT						17.569.249.989,00								17.092.417.198,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.569.249.989,00								17.092.417.198,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						17.569.249.989,00								17.092.417.198,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor</i>	100 %			100 %	8.039.249.974,00						100 %	8.142.417.198,00		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia</i>	16 Dokumen			16 Dokumen	77.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	16 Dokumen	77.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan OPD</i>	100 % 100 %			100 %	5.185.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	100 % 100 %	5.185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30/12 Orang/bulan	5.000.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Kartu Inventaris</i>	100 % 100 %			100 %	210.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	100 % 100 %	210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				8 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN</i>	134 Orang 134 Orang			134 Orang	255.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	134 Orang 134 Orang	255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				132 Paket	195.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		195.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	60.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Administrasi Umum</i>	100 % 100 %			100 %	611.590.434,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	100 % 100 %	631.590.434,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				210 Paket	4.990.434,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		4.990.434,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				800 Paket	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	95.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	380.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD	26 Unit 26 Unit			26 Unit	395.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	26 Unit 26 Unit	412.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	120.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		67.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 Bulan 12 Bulan			12 Bulan	173.987.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	12 Bulan 12 Bulan	173.987.300,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.316.185,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		1.316.185,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	22.671.115,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		22.671.115,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bangunan/Kendaraan Kantor Kondisi Baik</i>	95 Unit 95 Unit			95 Unit	1.131.672.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan	95 Unit 95 Unit	1.197.839.464,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				32 Unit	531.300.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		584.430.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				54 Unit	30.372.240,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		33.409.464,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	370.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan		380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Tingkat tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan</i>	100 %			100 %	3.355.000.015,00						100 %	2.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia</i>	300 Unit 300 Unit			45 Unit	135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	45 Unit 45 Unit	185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				25 Unit	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5. Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>				20 Unit	35.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	100 % 100 %			100 %	1.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>				1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia</i>	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal Empat Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	100 % 100 %			100 %	280.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan	100 % 100 %	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>				1000 Unit	45.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														
			<i>Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</i>				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				8 Unit	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Pengguna Angkutan Jalan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	1.090.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3. Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	1.105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				36 Laporan	980.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3.Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		990.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3.Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3.Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Terlaksananya Razia/operasi</i>	10 Razia/Operasi Gabungan 10 Razia/operasi gabungan			2 Razia/Operasi Gabungan 2 Razia/operasi gabungan	90.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Razia/Operasi Gabungan 2 Razia/operasi gabungan	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkak Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 2.Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	175.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3.Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	175.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkak Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 3.Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkak Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	15,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Unit	15,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen 5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen 1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Tingkat pemenuhan Pelayanan Pelayaran</i>	100 %			100 %	6.175.000.000,00						100 %	6.150.000.000,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Iilir, Tungkai Empat Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Iilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	1.090.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		1.090.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.09.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	35.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.10.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	100 % 100 %			100 %	535.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	535.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau</i>				10 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau</i>				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	100 % 100 %			100 %	4.405.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	4.405.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				4 Unit	900.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan</i>				1 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														
			<i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara</i>				3 Unit	995.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		995.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2 - Peningkatan dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Daerah 5.Pembangunan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.17.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ili, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.19.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ili, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3 - Tata Kelola Pemerintahan 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	Dinas Perhubungan dan Masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
J U M L A H								17.569.249.989,00							17.092.417.198,00	